

BAB V

PENUTUP

Ikhtisar keuangan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, yang merupakan pelaksanaan tahapan tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah tahun anggaran 2020 setelah perubahan APBD dianggarkan sebesar **Rp1.884.608.551.353,00** dapat terealisasi **Rp 1.843.357.296.448,00** atau sebesar **97,81%**.
2. Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 setelah Perubahan sebesar **Rp2.034.811.966.163,00** dapat direalisasi sebesar Rp **1.821.790.872.747,00** atau sebesar **89,53%**.
3. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar **Rp173.138.414.810,00** dapat direalisasi sebesar **Rp173.138.414.810,00** atau **100,00%**, sesuai anggaran sebesar **Rp173.138.414.810,00** yang terdiri dari :
 - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) direncanakan **Rp148.138.414.810,00** terealisasi **100%**.
 - Pencairan dana cadangan direncanakan **Rp25.000.000.000,00** terealisasi **100%**.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar **Rp22.935.000.000,00** dapat direalisasi sebesar **Rp16.363.000.000,00** atau **71,35%** dan sebesar **Rp16.363.000.000** atau **100,00%** berupa Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Kabupaten Wonosobo kepada BUMD.
 - c. SILPA Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp148.138.414.810,00** berasal dari realisasi pendapatan dikurangi realisasi belanja ditambah pembiayaan netto.

Ikhtisar di atas merupakan kondisi keuangan yang dilaporkan sampai dengan akhir Januari 2020. Pelaporan keuangan tahun 2020 akan dilaporkan secara lebih akurat pada tahapan Laporan Keuangan Daerah.

Sebagai catatan akhir, capaian penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020 masih terdapat beberapa kelemahan, dan harus diperbaiki di masa mendatang. Bagaimanapun, beberapa hasil yang dicapai tahun 2020 ini semoga bisa memberikan basis yang lebih kuat bagi pembangunan Kabupaten Wonosobo di tahun mendatang. Oleh karena itu, jajaran Pemerintah Kabupaten terbuka menerima evaluasi objektif, saran, masukan konstruktif dan alternatif solusi dari berbagai pihak untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan.